

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Kania, D. (2023). *Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Kawin*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyo, H. A. M. T. (2015). *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harahap, M. Y. (1975). *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hartati, S. (2023). *Dampak Sosial Ekonomi Perkawinan Dini: Perspektif Hukum Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Lestari, A. (2020). *Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rizkia, N. D., dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Putri, A. M. (2020). *Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Dan Pendidikan Anak Di Indonesia*. Komunitas Sejahtera.

Rahmawati, L. (2019). *Analisis Yuridis Dispensasi Pernikahan Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Graha Ilmu.

Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Soemin, S. (1992). *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati, S. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Susilo, T. (2020). *Program Edukasi Dan Penanggulangan Pernikahan Dini Di Pedesaan*. Penerbit Nusantara.

Waluyadi, W. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Artikel dalam Jurnal

Adhyaksa, G., Fathanudien, A., & Nurohmahwati, W. (2021). Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 42-54.

Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1).

Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 90-99.

Bahroni, A. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncito Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Transparansi Hukum*.

Bidaya, Z. (2019). Kajian yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif pendidikan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 48-58.

Budiarjo, S. (2020). Perlindungan hukum anak dalam perkawinan dini. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 187-204.

Dantes, K. F., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022, September). *The future impact of electronic signature (e-signature) in the E-GMS of limited*

liability companies. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2573, No. 1, p. 030017). AIP Publishing LLC.

Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2025). *Notary Deed in the Implementation of Local Government Asset Grants as an Effort to Transfer Regional Property*. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11256.

Farasya, I. (2022). 12 definisi nikah menurut para ahli. *Definisi Menurut Para Ahli*.

Fatullah, F. (2021). *Dilema pengaturan dispensasi kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)* [Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno].

Femilya Herviani, E. Z. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif. *Jurnal Intelektualita*, 118.

Gusnardi, & Sari, D. (2021). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. *Unes Law Review*, 4(2), 1-15.

Hidayati, N. (2021). Faktor penyebab dan dampak psikologis pernikahan anak (Studi kasus di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak). *Jurnal Taujih*, 10(1), 45-56.

Hidayati, R. (2020). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2(3).

Kurniawan, B. (2021). Analisis dispensasi perkawinan di pengadilan agama. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 8(3), 20-33.

Kurniawan, M. A. (2021). *Kematangan Fisik dan Mental dalam Mewujudkan Tujuan Pernikahan*. Nizham Journal.

Maharini, U. (2024). Mengupas pengertian pernikahan menurut para ahli: Lebih dari sekadar ikatan suci. *Viktolia*.

Markis, M., Erniyanti, E., & Aminah, T. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjung Batu Kab. Karimun). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5810-5829.

Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan upaya hukum dalam. *Lex Et Societatis*, 34.

Nasution, M. S. A., Akbar, A., & Siagian, M. (2020). Tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 0017/Pdt. P/2020/Pa. Lpk). *Al-Hukama': The*

Indonesian Journal of Islamic Family Law, 10(2), 271-294.

- Novita, N. (2024). Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 110-119.
- Nurhidayah, S. (2022). Implementasi PERMA No. 05 Tahun 2019 dalam pengajuan dispensasi perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 10(1), 42-55.
- Pamungkas, S. (2021). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif hukum administrasi negara.
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Prihatini, M. (2020). Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengurangi perkawinan di bawah umur. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 215-234.
- Putri, A., & Prasetyo, D. (2023). Dampak psikologis perkawinan anak terhadap perkembangan mental anak di Indonesia. *Psikologi Sosial Indonesia*, 12(2), 12-20.
- Rachman, F. (2018). Perkawinan anak dan dampak psikologisnya. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 99-113.
- Rahmawati, D. (2021). Tinjauan hukum terhadap dispensasi perkawinan bawah umur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Rahmawati, F. (2023). Dampak psikologis pernikahan dini terhadap keluarga harmonis. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2(3), 213-223.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Sari, D. P., & Lestari, S. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Jurnal Fokus*, 4(2), 81-90.
- Sari, M. (2020). Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 101-110.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245.

Setyawati, N. I., & Rusli, Z. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 279-291.

Tamin, B. E. D. (2019). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3).

Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi perkawinan anak setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241-249.

Tirang, Y. (2019). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3(2).

Wibowo, S. E. (2019). Dampak sosial dan psikologis pada pasangan pernikahan dini. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 3(2), 115-130.

Artikel dalam Internet

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2019). *Perkawinan usia anak dapat merugikan negara*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. (2025).

Fitria, A. (2022). *Penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan dampaknya pada anak perempuan*. Pustaka Bangsa.

Harlina, S., & Aiyub, A. (2018). *Konsep kecemasan*

Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insani.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan tahunan perlindungan anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Undang-Undang Perlindungan Anak dan implementasinya di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Kebijakan perlindungan anak dalam pembangunan nasional*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pusat Studi dan Data Kependudukan (Pusdeka). (2023). *Indonesia darurat perkawinan anak*.

Selye, H. (2013). *Stress in health and disease*. Butterworth-Heinemann.

Tina, D. (2022). *Ini dampak psikis perkawinan anak*. Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Unicef Indonesia. (2022). *Child protection and economic growth: A holistic approach to sustainable development*. Unicef Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia. (2017). *Siasati laju pertumbuhan penduduk dengan kualitas SDM dan teknologi*.

Karya Tulis Ilmiah

Nurhayati. (2021). *Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: Studi implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan* (Tesis magister). Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Salamah, F. (2022). *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)* (Skripsi sarjana). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

UNICEF. (2020). *Child Marriage And The Law: A Global Review Of The Legal Frameworks*. UNICEF.